

Manajemen Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Supawi¹, Titik Haryati²

SDN 2 Kedungbacin, Todanan, Blora¹
Pascasarjana Universitas PGRI Semarang²
supawi1984@gmail.com¹

Abstrak

Sesuai dengan keberadaannya, manusia selalu bernaluri untuk melakukan perubahan yang pada akhirnya perubahan tersebut akan membawa pada kemajuan dalam realitas kehidupan. Untuk itu perlu adanya pengalihan, pelestarian dan pengembangan kehidupan manusia sebagai upaya pembenahan melalui manajemen dalam suatu organisasi khususnya pendidikan. Manajemen dalam pendidikan merupakan kunci dari segala bentuk kemajuan pendidikan sepanjang sejarah peradaban manusia dan perkembangan pendidikan. Manajemen merupakan sebuah pondasi yang sangat signifikan dalam merumuskan aturan-aturan kelembagaan di era otonomi daerah sekarang ini, karena manajemen yang berada dalam pendidikan sebagai supra infra struktur yang ada dalam dunia pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan dalam renstra pendidikan nasional diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat. Di era otonomi daerah atau dalam konsep desentralisasi pendidikan dalam pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan dan penentu kebijakan secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah/kota, lembaga pendidikan sampai pada kelas atau guru yang secara langsung menjadi eksekutor utama dalam proses rangkaian perjalanan pendidikan.

Kata Kunci: *Manajemen, Mutu Pendidikan, Otonomi Daerah*

Abstract

In accordance with their existence, humans always have the instinct to make changes which ultimately will lead to progress in the reality of life. For this reason, it is necessary to transfer, preserve and develop human life as an effort to improve through management in an organization, especially education. Management in education is the key to all forms of educational progress throughout the history of human civilization and educational development. Management is a very significant foundation in formulating institutional rules in the current era of regional autonomy, because management in education is the supra-infrastructure that exists in the world of education. The policy of improving the quality of education in the national education strategic plan is directed at achieving ever-increasing quality of education. In the era of regional autonomy or in the concept of educational decentralization in the management, implementation, development and determination of policy in a structured manner starting from the central government, provincial government, regional/city government, educational institutions to the class or teacher who directly becomes the main executor in the implementation process. education.

Keywords: *Management, Education Quality, Regional Autonomy*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan eksistensinya, manusia selalu bernaluri untuk melakukan sebuah perubahan yang pada akhirnya perubahan tersebut akan bermuara pada kemajuan dalam realitas kehidupan baik kemajuan pada ranah teknis maupun mekanisnya. Maka sejak itu, timbul gagasan untuk melakukan pengalihan, pelestarian dan pengembangan kehidupan manusia sebagai upaya pembenahan yang berjalan dengan sinergi melalui manajemen dalam suatu organisasi tertentu khususnya pendidikan. Manusia bahu-membahu dan saling berpacu untuk melakukan perubahan, sehingga manajemen menjadi semakin penting peranannya untuk mengantarkan suatu lembaga pendidikan pada terciptanya mutu pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya, bahkan boleh dikatakan manajemen dalam pendidikan merupakan kunci dari segala bentuk kemajuan pendidikan sepanjang sejarah peradaban manusia dan perkembangan pendidikan.

Manajemen merupakan infra struktur yang mempunyai peran sangat signifikan dalam merumuskan aturan-aturan kelembagaan untuk melakukan rekonstruksi dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Secara praktis, manajemen pendidikan harus ditingkatkan ke arah yang lebih baik dalam relevansinya untuk tujuan pendidikan institusional daerah maupun tujuan pendidikan nasional.

Secara sederhana manajemen mempunyai arti yang sangat luas dan bisa masuk dalam ranah ilmu lainnya. Lebih dikenal bahwa manajemen sering digunakan dalam suatu lembaga atau organisasi yang telah ada. Melihat dari sini bahwa pendidikan yang berada dalam suatu lembaga tentunya tidak bisa lepas dari manajemen atau pengelolaan untuk mengembangkan tercapainya tujuan pendidikan (Asmani, 2009: 70).

Berbicara tentang manajemen, dewasa ini banyak yang menafsirkan istilah manajemen dengan berbagai pengertian gaya bahasa masing-masing. Maka disini dapat dijelaskan istilah manajemen menurut Manullang (2008: 3) manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Dengan konsepnya *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Secara luas, fungsi dan manajemen berlaku dalam bidang yang sangat luas atau dalam bidang-bidang umum seperti (perusahaan, organisasi, pemerintah), karena itu sifatnya yang universal.

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu yang mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan memiliki manfaat. Oleh sebab itu, manajemen perlu melakukan rekonstruksi dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

Secara luas, pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sedangkan secara sempit, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dengan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang

diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas sosial mereka (Maunah, 2009: 1).

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 ayat 1 menyatakan: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".

Jadi, jika mengacu pada Undang-Undang di atas, hakekatnya dari pendidikan adalah agar anak didik setelah dewasa nanti mampu melewati kehidupan dengan bekal kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat-alat yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Unsur manajemen dalam pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian proses yang mempunyai fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang terkait dalam bidang pendidikan (Hidayat dan Machali, 2010: 5).

Dengan melihat kajian di atas, tentunya dalam pendidikan kita tidak akan bisa terpisahkan dengan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan mengatur proses berjalannya dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Manajemen merupakan sebuah pondasi yang sangat signifikan dalam merumuskan aturan-aturan kelembagaan di era otonomi daerah sekarang ini, karena manajemen yang berada dalam pendidikan sebagai supra infra struktur yang ada dalam dunia pendidikan.

Kebijakan desentralisasi yang dimulai sejak 1 Januari 2001, diawali dengan pelimpahan sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang membawa konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan pemerintahan, termasuk kelembagaan pendidikan.

Secara filosofis, otonomi daerah mengandung makna pemberdayaan potensi dan masyarakat daerah sehingga memiliki kemampuan untuk mengelola semua potensi yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Namun demikian, pemberdayaan masyarakat daerah haruslah berjalan seiring dengan kepentingan regional dan nasional, serta pemanfaatan berbagai peluang yang diciptakan oleh proses global. Dalam konteks inilah, pendidikan memiliki peran strategi dalam mewujudkan cita-cita otonomi daerah tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Matry, 2008: 2).

Dengan demikian, maka pentingnya mengkaji peran manajemen dalam sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah, karena pendidikan yang ada harus benar-benar menjadi proyeksi untuk

generasi bangsa ke depan lebih baik. Disisi lain, menejemen yang merupakan supra dari pendidikan perlu dirumuskan dari konsep dan yang lainnya, upaya untuk mensinergikan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu asal kata dari *Manus* yang berarti tangan dan *Agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi satu yaitu *Manager* yang mempunyai arti menangani. Kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris *manajement* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia manajemen atau pengelolaan (Usman, 2008: 4).

Manajemen mempunyai banyak perkembangan dan pengertian dalam konteks manajemen dengan melihat objek pokok permasalahan yang kemudian akan dilakukan. Dalam *Encyclopaedia of the Social Science* terdapat tentang definisi manajemen yaitu "*The proses, by which the excytion of a given purpose is put into operastioan and suporvited*" dalam bahasa Indonesia manajemen adalah proses dengan melaksanakan dari pada suatu tujuan tertentu di selenggarakan dan diawasi (Panglaykim dan Tanzil, 2008).

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni dalam upaya memanfaatkan sumber daya manusia dan daya lain dalam kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan melibatkan peran seluruh anggota secara aktif dalam mencapai tujuan yang ditentukan (Zazin, 2011: 28).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam arti lain, manajemen adalah pengelolaan usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif untuk mencapai sasaran organisasi yang diinginkan. Sedangkan dalam kegiatan pendidikan, manajemen dapat diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan evaluasi dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk membentuk peserta didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan.

Fungsi Manajemen

Institusi manajemen dalam dunia pendidikan merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, semua kegiatan yang dilakukan didalamnya selalu dimasukkan untuk mencapai cita-cita. Berkaitan dengan apa yang akan dilakukukan dalam mencapai sebuah tujuan yang maksimal tentunya harus ada manajemen yang baik pula. Karena, manajemen merupakan sebuah pondasi yang mempunyai peran sangat urgen dalam keberlangsungan visi dan misi sebuah lembaga pendidikan atau organisasi (Mulyono, 2008).

Dari berbagai banyak kalangan yang mendefinisikan dan fungsi manajemen, disini fungsi manajemen dalam teorinya George R. Terry (dalam Manullang, 2008: 3) adalah *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

a. *Planning*

Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari keseluruhan fungsi manajemen sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ahli. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Hidayat dan Machali, 2010: 22).

Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif untuk mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna untuk mecapai yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya (Usman, 2008: 61).

Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai sampai pada rumusan yang lebih rumit. Ada yang merumuskan dengan sangat sederhana, misalnya perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai.

b. *Organizing*

Manusia adalah makhluk organisasi. Oleh karena itu, begitu ia dilahirkan kedua, ia menjadi anggota organisasi genetis yang disebut dengan anggota organisasi keluarga. Bahkan organisasi itu sudah ada sebelum kita dilahirkan karena kelahiran kita juga dari hasil perkawinan.

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun sumber daya yang disyaratkan dalam rencana, terutama dalam sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan pengorganisasian orang-orang dapat disatukan dalam satu kelompok atau lebih untuk melakukan berbagai tugas. Dan tujuan pengorganisasian ini adalah membantu orang-orang untuk bekerja sama secara efektif dalam wadah organisasi atau lembaga (Hidayat dan Machali, 2010: 26).

Organisasi atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan mencapai terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu (Manullang, 2008: 10).

Dalam rangkaian manajemen tentang pengorganisasian, agar tujuan dapat tercapai maka pengorganisasian sangatlah dibutuhkan. Dalam suatu lembaga biasanya diwujudkan dalam bagan bentuk organisasi yang kemudian dipecah menjadi beberapa jabatan yang kesemuanya mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan uraian jabatan (*job discription*).

c. *Actuating*

Dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan, tentunya manajemen haruslah dirumuskan secara serius. Dari perencanaan yang kemudian berorganisir terhadap rekrutmen atau pembagian bidang masing-masing. Maka pelaksanaan yang menjadi peran utama.

Penggerakan (*actuating*) adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakan merupakan upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja (*man power*) serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama (Hidayat dan Machali, 2010: 27).

Actuating merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan pelaksanaan tentang apa yang telah menjadi konsep atau rencana yang ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan hasil dari manajemen pelaksanaan menjadi peran utama dalam hal ini, karena keberhasilan dalam suatu organisasi ditentukan dengan pelaksanaan yang baik yang sesuai dengan tujuan utamanya. Oleh karena itu, fungsi manajemen dalam *actuating* atau pelaksanaan suatu hal yang harus dipahami dengan baik oleh setiap individu organisasi atau lembaga pendidikan dalam menjalankan tugas untuk mencapai visi dan misinya.

d. *Controlling*

Pengendalian (pengawasan) atau *controlling* adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu sendiri. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam organisasi adalah akibat masih lemahnya pengendalian sehingga terjadilah sebagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.

Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengendalian dengan pengawasan adalah pada wewenang dari pengembangan kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Jadi, pengendalian lebih luas dari pada pengawasan (Usman, 2008: 469).

Controlling atau pengawasan yang sering disebut juga dengan pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahannya dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud mencapai tujuan yang sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan kegiatan *controlling*, atasan mengadakan pemerinkasaan, mecocokan, serta mengusahakan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Manajemen Mutu Pendidikan

Mutu atau *quality* sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang kontradiktif sebab disatu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep yang *absolute*

dan disisi lain juga dapat diartikan sebagai konsep *relative*. Sebagai konsep yang *absolute*, mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk kebaikan, kecantikan dan kebenaran yang memungkinkan standar tinggi rrdan tidak dapat diungguli. Dalam pemahaman seperti ini, produk-produk dianggap bermutu bila produk tersebut disebut dengan sempurna dan tidak menghemat biaya.

Sebagai konsep dasarnya, mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki. Menurut filosofi manajemen lama, "kalau belum rusak janganlah diperbaiki". Mutu didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak konsep yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru, "bila tidak rusak, perbaikilah, karena bila anda tidak melakukan orang lain pasti melakukannya" (Arcare, 2005: 14).

Salah satu dasar pemikiran yang melandasi lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan baik secara eksternal maupun secara internal khususnya menghadapi tantangan persaingan global. Ada tiga pilar kemampuan dasar yang diperhatikan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global yaitu kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia, yang kesemuanya itu dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu. Mutu yang dimaksud bukan hanya memenuhi standar nasional tetapi juga perlu memenuhi standar internasional (Matry, 2008: 166).

Manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus menerus pada hasil atau proses disebuah lembaga pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Oleh karena itu, untuk melakukan bagaimana kualitas mutu pendidikan yang diharapkan dapat mencapai hasil maksimal dari hasil pembelajaran, maka secara sederhana kita harus juga memperhatikan dan memerlukan tentang manajemen perencanaan mutu dan kebijakan mutu dalam suatu lemabaga pendidikan untuk menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional.

Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi institusi dan didekati secara sistematis dengan menggunakan proses strategis (Sallis, 2010: 211). Mutu yang dapat ditingkatkan dalam pendidikan adalah meliputi input, proses, dan output pendidikan.

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud, berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses.

Proses pendidikan adalah mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap keberlangsungannya proses disebut input, sedang sesuatu hasil dari proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan lembaga, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi. Dengan catatan, proses belajar

mengajar memiliki catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses yang lain.

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/prilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitas, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kerjanya, dan moral kerjanya.

Oleh karena itu, untuk selanjutnya pemerintah melakukan perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat ditempatkan pada prioritas tertinggi dalam pembangunan pendidikan. Mutu dan relevansi pendidikan tercermin dari kemampuan membentuk kecakapan (*competencies*) lulusan agar dapat menjadi pekerja produktif dengan upah yang lebih tinggi. Kesempatan pendidikan keahlian, keterampilan dan profesi harus besar dan merata dikaitkan dengan sentra-sentra pengembangan ekonomi industri, pendayagunaan iptek, dan peningkatan kecakapan hidup yang sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Pendidikan dengan perspektif ekonomi secara nyata beralih fungsi menjadi mesin pencetak tenaga kerja baik pada skala lokal, nasional, dan internasional.

Pelaksanaan rencana peningkatan mutu dengan mendayagunakan sumberdaya pendidikan yang tersedia semaksimal mungkin, menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang dianggap efektif, dan menggunakan teori-teori terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah dan guru bebas mengambil inisiatif dan kreatif dalam menjalankan program-program yang telah diproyeksikan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Karena itu, sekolah harus dapat melepaskan ikatan-ikatan birokratis yang banyak menghambat laju penyelenggaraan pendidikan.

Peningkatan mutu, dalam pembangunan pendidikan nasional akan memberikan dampak luas pada terwujudnya eksistensi insan-insan Indonesia yang lebih mandiri dan mampu bersaing di dalam konteks pergaulan yang makin mengglobalkan. Di samping itu, peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing juga meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti luas. Peningkatan mutu pendidikan misalnya dapat dilihat dari terjadinya peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kemampuan yang meliputi: (a) peningkatan ketaqwaan dan keimanan; (b) berkembangnya wawasan kebangsaan; (c) terbentuknya kepridian nasional yang tangguh; (d) prestasi akademik maupun non-akademik.

Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam renstra pendidikan nasional diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar dalam ketentuan minimal yang harus terpenuhi, ini berarti bahwa setiap pendidikan atau sekolah harus dapat mencapai kualitas minimal dengan standar tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya yang kreatifitas untuk memastikan atau meyakinkan bahwa proses pendidikan yang dikelolanya akan menghasilkan *output* dan

outcome yang bermutu (minimal sesuai standar kompetensi lulusan). Untuk mencapai standar tersebut harus ada penjaminan dan pengendalian dari semua aspek pengelolaan pendidikan.

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Replubik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan memungkinkan bagi setiap warga negara mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan sosial.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayagunakan semua warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing dan tingkat nasional, regional, dan internasional; (c) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (d) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (e) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan yang bermoral; (f) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global.;(g) mendorong serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Replubik Indonesia.

KESIMPULAN

Manajemen adalah sebuah teori yang digunakan sebagai landasan pijakan untuk menjalankan segala aktivitas organisasi yang telah ditentukan bersama, demi tercapainya kebersamaan visi dan misi dalam institusi lembaga pendidikan khususnya baik dalam ranah tujuan yang bersifat nasional maupun institusional itu sendiri.

Peningkatan mutu pendidikan menjadi masalah yang sangat urgen, berkaitan dengan pelanggan dari pengguna pendidikan secara langsung. Masyarakat pada umumnya untuk terus memperbaiki, mengembangkan semua potensi yang secara kelembagaan akan difasilitasi oleh lembaga pendidikan. Di era otonomi daerah atau dalam konsep desentralisasi pendidikan dalam pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan dan penentu kebijakan secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah/kota, lembaga pendidikan sampai pada kelas atau guru yang secara langsung menjadi eksekutor utama dalam proses rangkaian perjalanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcare, Jerome S. (2005). *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asmani, Jamal Ma'mur. (2009). *Manajemen Pengelolaan Pendidikan dan Kepemimpinan Pendidikan Professional*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Hidayat, Ara dan Machali, Imam. (2010). *Pengelolaan Pendidikan "Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah"*. Bandung: Pustaka Eduka.
- Manullang, M. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Matry, Nurdin. (2008). *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Aksara Madani.
- Maunah, Binti (2009). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Mulyono. (2008). *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Panglaykim dan Tanzil, Hazil. (2008). *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sallis, Edward. (2010). *Total Quality Manajemen in Education* (terjemah Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi "Manajemen Mutu Pendidikan"). Jogjakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Sekretariat Negara. (2004). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Usman, Husaini. (2008). *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zazin, Nur. (2011). *Gerakan Menata Mutu Pendidikan "Teori dan Aplikasi"*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.